

*Redefinisi Peran Komunitas Akademis dalam Arena Civil Society: Sebuah Tinjauan Historis**

Riris Priyanto

Abstract

Civil society is an arena in which all social entities interact and freely express themselves, based on common values and is built by the four pillars of social actors: the academic community, civic community, mass media, and political parties. Unfortunately for years there has been a discord among the four, especially between the academic community and the civic community, as in the case of Indonesia. This paper is composed from a series of long discussions, held as part of the institutionalization process of Pacivis—Center for Global Civil Society Studies. It gives a historical outlook of the development of the academic community's roles, its significance in the civil society arena and the necessity to reorganise the academic community in order to regain its strategic place in civil society.

PENDAHULUAN

Civil Society sebagai arena di mana semua entitas sosial berinteraksi dan berekspresi secara bebas dengan didasari oleh *common values*, terbangun dari empat pilar aktor sosial. Keempat pilar tersebut adalah institusi pendidikan tinggi (diperankan oleh komunitas akademis), organisasi masyarakat sipil / organisasi rakyat (digcrakkan oleh komunitas *civic*), lembaga media massa, dan —walaupun masih menjadi kontroversi—partai politik yang merupakan ujung tombak perjuangan politik masyarakat. Pilar-pilar ini masing-masing memegang peran sentral dalam pergerakan *civil society*, yaitu peran representasi rakyat, partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, edukasi, dan advokasi.

There is no question that people who have difficulty engaging in the public arena can find online engagement a solution of their problem.

But it is in reality not a solution, but an avoidance of the difficulty.

Speaking eloquently, persuasively, passionately, is essential to citizenship in a democracy.

How, when, and where is she to learn this essential ability if not in a university?

If she leaves the university as ill equipped for democracy participation as when she entered, then the institution has failed her and democracy it should serve.

David Noble

Namun, adanya kebutuhan untuk saling mendukung itu, tidak menjamin selarasnya hubungan antara kalangan akademisi dengan pilar-pilar *civil society* lainnya, terutama komunitas sipil. Setidaknya di Indonesia, relasi yang tidak ideal antara komunitas akademis dan para praktisi masyarakat, sudah menjadi rahasia umum. Berbeda dengan misalnya, hubungan yang cukup harmonis yang terbangun antara masyarakat sipil dengan kalangan media sebagai pilar lain dari *civil society*, yang memang sepertinya lebih mampu dan mau, serta butuh untuk mendukung agenda-agenda sipil.

Masalah utama yang menghambat terbentuknya kerjasama yang mulus antara dua institusi ini adalah hilangnya kepercayaan (*trusty* yang mengakibatkan munculnya pandangan-pandangan minor, terutama dari kalangan masyarakat sipil terhadap kalangan akademis. Selama ini, kalangan NGO menilai bahwa universitas (terutama universitas-universitas negeri besar di Indonesia) tidak memiliki keberpihakan pada perjuangan rakyat, terutama karena universitas telah dicap sebagai penyebar paradigma 'kanan asing' (kapitalisme), V^{an}g meminggirkan rakyat, dan menyumbang pada kebangkrutan ekonomi.

Universitas di Indonesia juga dianggap telah mencampurbaurkan basis ilmu pengetahuan (*knowledge*) dengan basis material, sehingga akhirnya terjebak pada 'semangat proyek' yang berakibat pada terkikisnya idealisme awal intitusi pendidikan tinggi. Kalangan akademis

akhirnya menjadi mandul dalam fungsi keilmuan (*scientific*) dan pemaknaan. Khususnya dalam konteks *civil society*^ komunitas akademik dipandang belum berhasil membangun wacana *civil society* secara komprehensif. Hingga kini terasa kesan yang sangat kuat bahwa kita harus mengadopsi pemahaman universal tentang *civil society* yang didiktekan oleh Barat, yang belum tentu dapat diterapkan secara utuh pada tataran nasional. Atau justru yang terjadi adalah masyarakat sipil berusaha membangun wacana ini berdasarkan apa yang didapatnya melalui pengalaman empiris, lalu universitas secara teratih-tatih berusaha menerjemahkannya dalam dalam konsep melalui *comparative knowledge*.

Selama ini universitas juga dianggap telah memposisikan dirinya di menara gading, yang membuatnya tidak memiliki kedekatan dengan fakta dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Apalagi dengan statusnya sebagai institusi yang relatif otonom, kedua kondisi tersebut membuat universitas tidak terbiasa bekerja di bawah mandat dan karenanya tidak berada dalam fungsi kontrol elemen lain dari *civil society*. Tanpa mandat, tanpa kontrol, kondisi ini berdampak pada timbulnya kesulitan bagi universitas untuk menjaga diri agar agar tidak lupa pada peran sosial V^{an}g seharusnya diembannya dan untuk tidak menjadi 'pengkhianat' perjuangan rakyat.

Intinya, peran dan fungsi komunitas akademis sebagai salah satu pilar *civil society* di Indonesia saat ini sedang sangat dipertanyakan. Suatu kondisi

yang ironis. Bukan hanya karena universitas dipandang telah kehilangan idealismenya, namun lebih dari itu juga karena pada awalnya pemahaman tentang *civil society* diperkenalkan di masyarakat kita justru oleh kalangan akademis. Adalah Prof. Emil Salim yang memperkenalkan istilah ini, yang lalu dialihbahasakan menjadi 'masyarakat madani', pada pertemuan Gerakan Non-Blok. Ide dasarnya adalah bahwa *civil society* harus dibangun secara profesional melalui tantangan golongan akademisi, yang diyakini memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap wacana ini. Pendekatan *top-down* ini menempatkan *civil society* seolah sebagai sebuah 'barang' baru yang harus ditumbuhkembangkan secara sistematis.

Dari segi kebahasaan, *civil society* memang barang baru. Tapi, eksistensinya di Indonesia bisa dirunut jauh hingga era 1910-an di mana masyarakat kala itu sudah mengenal wadah untuk saling berinteraksi dalam bentuk serikat. Sejak saat itulah sebenarnya kita mulai bergerak dengan semangat kolektifitas anti kolonialisme, yang nyata berbeda dengan model primordial yang telah mengakar di budaya kita sebelumnya. Pertengahan 1940-an kesadaran bermasyarakat beralih wujud ke dalam bentuk republik, yang dianggap mampu mewadahi kedaulatan rakyat, dengan semangat menggebu untuk secara bersama-sama bertanggung-jawab untuk mengurus negeri.

Pada periode 1960-an negara memelopori berkembangnya wacana politik kelas. Dengan instrumen-instrumen kekuasaannya, negara secara sistematis mengagregasi masyarakat ke dalam berbagai kelompok produksi yang juga dikotak-kotak oleh pahamnya masing-masing. Dengan dalih berlindung dari komunisme, wacana ini juga lalu dibabat habis oleh negara. Ini adalah awal dari periode baru kematian wacana kebersamaan, di mana pada kurun 1970-an aspirasi rakyat mulai dibungkam dan semangat kedaulatan rakyat mulai dikhianati. Selama dua dekade berikutnya gerakan swakarsa masyarakat yang mengusung agenda politik antipembangunan dan politik kedaulatan rakyat antinegara, dipaksa untuk bermain di wilayah abu-abu. Terus demikian hingga Icngsernya Soeharto.

Momentum jatuhnya re?Im ini pada medio 1998 diakui oleh sebagian kalangan seperti telah mengembalikan semangat sipilitas yang sebelumnya mati suri. Partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi rakyat, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok sejenis tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. *Civil society* yang memainkan peran sebagai penyeimbang komunitas ekonomi dan komunitas politik, mulai menemukan jalur (*patfj*)-nya. Sedapat mungkin arena sosial yang masih menggebu ini berusaha lepas dari dominasi pasar, dominasi negara, dan dominasi-dominasi lain yang bersifat dogmatis. Walaupun tetap ada pandangan sinis yang melihat bahwa tindak tanduk *civil society* saat ini sebenarnya merupakan karikatur dari

uncivilised society, namun, setidaknya ada keinginan untuk secara serius membentuk konteks masyarakat yang terbuka secara santun dan kreatif.

Lalu, di manakah keberadaan komunitas akademis dalam proses tersebut? Atau pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masih ada peluang bagi komunitas akademis untuk berkontribusi pada proses tersebut? Mampukah komunitas akademis menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar *civil society*?

EVOLUSI GAGASAN DASAR KOMUNITAS AKADEMIS

Mengapa pendidikan tinggi, khususnya universitas, diadakan?

Ada beberapa ide dasar yang berkaitan dengan pembentukan perguruan tinggi secara umum, dan universitas secara spesifik, yaitu:

untuk mendidik kalangan muda agar dapat menjadi insan yang memiliki tanggung jawab pada masyarakat global - Hannah Arendt untuk melindungi individu dan kondisi kekosongan (*nothingness*) — Plato untuk menumbuhkan nilai-nilai prinsip yang harus mendarah-daging pada setiap individu sehingga akan melahirkan perilaku yang rasional — Immanuel Kant sebagai institusi dengan kekayaan sumber daya manusia dan sekumpulan talenta yang dalam

rangka memperjuangkan kebcnaran — Michael Oakeshott.

Konsepsi-konsepsi filosofis itu lalu diterjemahkan secara kontekstual dan berkembang menjadi beberapa tradisi pendidikan tinggi modern sejak awal abad 19.

Model yang berkembang di Jerman, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kant, menekankan pada pentingnya penerapan konsep-konsep rasionalitas yang akan menjadi arahan (*guidelines*) bagi universitas. Hal ini awalnya berdampak pada terjadinya konflik berkepanjangan antara kelompok *higher faculties* yang sudah berkembang sejak lama (teologi, hukum, dan kedokteran), dengan kelompok *lower faculties* yaitu fakultas filosofi yang berkembang dengan didasari oleh kebebasan rasional. Tapi, adanya bidang kajian filosofi ini akhirnya justru dianggap sebagai ciri khas dari universitas yang membedakannya dari institusi pendidikan lain yang lebih berorientasi aplikasi.

Selanjutnya, perkembangan universitas di Jerman banyak dipengaruhi tidak hanya oleh rasionalitas Kant, tetapi juga pemikiran idealis yang dikembangkan oleh para pemildr Jerman seperti Wilhelm von Humboldt. Inti dari tradisi idealis ini adalah bahwa fungsi edukasi, pelatihan profesional, dan penelitian, adalah tiga hal yang tidak terpisahkan, sehingga harus diwadahi di bawah satu payung universitas. Lebih jauh, Humboldt berpendapat bahwa universitas sebagai institusi akademis tertinggi adalah tempat terjadinya

penyatuan antara perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya eksakta, dan pengasahan kemampuan praktis dan spiritual, yang pada akhirnya akan berdampak pada terbentuknya budaya moral nasional. Pemikiran ini terus dikembangkan hingga memasuki abad ke-20, dimana universitas di Jerman mulai diposisikan sebagai sebuah tempat berkumpulnya banyak individu yang secara profesional mendedikasikan diri untuk mengembangkan dan menyalurkan kebenaran dalam konteks ilmiah. Penekanan peran atau fungsi pengajaran di universitas berawal dari sini.

Berbeda dengan di Jerman, di Inggris universitas awalnya dibangun untuk melayani kepentingan religius, sebagai akibat dari konteks kultural Inggris yang pada masa itu sangat didominasi oleh rasionalitas empiris dan sekularisasi budaya. Untuk kepentingan itu, universitas di Inggris lalu menerapkan *circle of sciences* yang divujudkan melalui tiga bidang keilmuan, yaitu teologi, ilmu alam, dan studi kesusastraan, yang merepresentasi dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, akalman, dan kemanusiaan (kontradiktif terhadap trilogi Kantian yang menekankan pada signifikansi dunia, diri, dan metafisik). Model yang dikembangkan oleh Kardinal John Henry Newman ini, yang lalu dikenal sebagai *Oxbridge Model*, didasari oleh pemahaman bahwa agama dan ilmu adalah dua ranah pengetahuan yang saling terpisah, walaupun tetap saling bersinggungan, sehingga tidak akan menjadi kontradiktif satu sama lain.

Melalui model ini, diharapkan universitas mampu menghasilkan aktor-aktor sosial yang memiliki intelektualitas tinggi dengan cara menanamkan pola-pola berpikir intelek dan mengembangkan kebudayaan intelektual.

Jauh dari pengaruh geraja Anglikan, di Skotlandia, walaupun memiliki fungsi yang kurang lebih sama yaitu sebagai agen pembentuk budaya intelek, universitas menggunakan cara yang lebih modern ketimbang *Oxbridge Model*. Menurut T.H. Huxley, salah satu tokoh pendidikan tinggi Skotlandia yang kemudian menjadi rektor Universitas Aberdeen pada tahun 1874, pembentukan kebudayaan sebaiknya dilakukan dengan cara menyelaraskan perkembangan ilmu-ilmu alam dan kedokteran, dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Hal yang secara radikal membedakan tradisi Skotlandia dengan tradisi-tradisi Sainnya adalah keyakinan mereka pada pentingnya alasan atau penjelasan (*reason*). Menurut mereka, adanya keunitarian alasan atau penjelasan terhadap berbagai subyek permasalahan baik dalam kajian eksakta, humaniora, ataupun teologi, merupakan hal utama yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan.

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa tradisi perguruan tinggi yang berkembang di Eropa Barat telah mengarahkan universitas untuk mendedikasikan aktivitasnya bagi pengembangan keilmuan, apakah itu ilmu-ilmu pasti, ataupun humaniora, dan bahkan ilmu-ilmu keagamaan.

Rusia mempraktikkan hal yang sedikit berbeda. Moscow University, misalnya, selain penekanan pada kegiatan riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan (khususnya eksakta), pendidikan tinggi juga—setidaknya sejak tahun 1775—telah diharapkan mampu mempersiapkan para alumninya agar sukses berkarir di bisnis, industri, dan pertanian.

Pendekatan yang jauh lebih berorientasi pasar, berkembang dalam sistem pendidikan tinggi di Amerika Utara sejak 1860-an, yaitu ketika aktor-aktor bisnis mulai dilibatkan dalam penyelenggaraan universitas. Hal ini terjadi karena universitas tidak memiliki jaminan pendanaan yang pasti, yang memaksa mereka untuk mencari clukungan langsung dari para pelaku bisnis setempat. Keterlibatan pihak-pihak yang tidak sepenuhnya berorientasi keilmuan di satu sisi, dan kondisi minimnya tokoh-tokoh pelopor keilmuan di sisi lain, menyebabkan model pendidikan tinggi di Amerika Utara seperti terjebak pada tuntutan praktis dan terseret menjauhi arus besar tradisi pengembangan ilmu seperti yang ditemukan di Eropa Barat

Dalam perkembangan selanjutnya, semakin dominannya peran aspek-aspek material dalam pendidikan tinggi menyebabkan menjamahnya perbedaan antara *the arts sciences* yang terus berkembang di daratan Eropa dan *the hard 'sciences'* yang berkembang secara signifikan di Amerika Utara. Perbedaan ini menjadi akar dari tumbuhnya dua golongan cerdik cendikia, yaitu kalangan intelektual (yang mendalami

ilmu-ilmu sosial dan humaniora) dan kalangan ilmuwan (yang mengembangkan ilmu-ilmu terapan). Demikian sulitnya menjembatani komunikasi untuk menjembatani perbedaan di antara dua kalangan ini mengakibatkan universitas seringkali disebut sebagai *'a community of dismuuf'*.

Menurunnya Popularitas Ilmu Sosial dan Kemamfaatan

Gregory J Walters dalam tulisannya *Technology* and Paideia: Reformatting the Idea of the University*, secara gamblang mengatakan bahwa ada indikasi penurunan peran universitas dalam pengembangan ilmu pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, yaitu terjadinya korupsi etika, adanya dominasi kalangan *entrepreneur* ilmiah, dan luntarnya profesionalisme.

Lebih lanjut, menurutnya, universitas dan juga institusi pendidikan tinggi lainnya telah kehilangan landasan dasar keilmuan yang membentuk mereka pada awalnya, yaitu *the liberation of humanity* (dalam tradisi Perancis), dan *the unity of all knowledge* (pada tradisi Jerman). Universitas dan pendidikan tinggi saat ini lebih menekankan pada aspek fungsional dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial. Kecenderungan yang berkembang belakangan ini adalah ilmu pengetahuan digunakan utamanya untuk mendukung kepentingan produksi—yang tujuan akhirnya adalah untuk sebuah pertukaran, atau bila

mengutip pernyataan Walters, *'knowledge is and will be produced in order to be sold'*.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar, pendidikan tinggi lebih diarahkan untuk kepentingan inovasi dalam konteks komersial, sehingga ilmu teknologi terapan mendapat tempat terhormat dan dapat berkembang dengan sangat pesat. Kondisi ini berdampak pada semakin tersisihnya ilmu-ilmu sosial dan humaniora dari agenda pengembangan ilmu pendidikan tinggi, terutama karena fakultas-fakultas ilmu sosial dan kemanusiaan ini ternyata tidak mampu memenuhi persyaratan untuk bertahan di era rang disebut oleh Walters sebagai *'the age of money'*. Tiga hal yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan di era komersial ini, yaitu: (i) *a promise of money*, dalam arti harus menghasilkan lulusan yang berprofesi bergengsi dengan gaji yang tinggi, (ii) *knowledge of money*, dalam arti adanya bidang-bidang kajian yang secara praktis terkait dengan cara-cara menghasilkan uang, dan (iii) *a source of money*, dalam arti fakultas tersebut harus mampu mengaitkan diri dengan lembaga-lembaga donor yang mau membiayai penelitian, memberi beasiswa, dan bentuk-bentuk kerjasama lain.

Penpektif Civic dari Komunitas Akademis

Masuknya kepentingan pasar secara dominan dalam dunia pendidikan tinggi, telah menjadikan institusi ini bagaikan—meminjam istilah William M Sullivan—*a mature industry* [^] }^{an}g

melakukan riset dan diseminasi ilmu pengetahuan serta menyediakan jasa hanya bagi kepentingan pembangunan ekonomi (industri/pasar). Ini merupakan identitas baru yang menyebabkan tersisihnya misi utama penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu memproduksi ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan (*science for sciences*).

Dampak lain dari label baru ini adalah hilangnya aspek-aspek sosial, politik, dan moral dalam 'industri' pendidikan tinggi, yang dalam jangka panjang telah mengakibatkan tergerusnya kesadaran para akademisi bahwa mereka adalah bagian dari *civil society* dan harus berpardsipasi di arena ini. Seperti yang dikatakan oleh John J Patrick, universitas telah menanggalkan *civic perspective* yang akan mengarahkan universitas untuk berorientasi pada pengembangan kontribusi secara maksimal pada *civil society*, sebuah sikap yang seharusnya dapat memandu mereka dalam berpartisipasi di arena sipil ini. Tanpa perspektif ini, pendidikan tinggi terbukti telah melenceng hingga justru memproduksi instrumen-instrumen individualis yang tidak berorientasi ke-n/w-an, ketimbang sebaliknya, mendukung berlangsungnya proses pembentukan identitas demokrasi publik.

MENGGAGAS PERAN KOMUNITAS AKADEMIS

Terlepas dari salah kaprahnya arah perkembangan pendidikan tinggi secara umum, bagaimanapun, pada dasarnya

pendidikan tinggi sebagai salah satu bentuk institusi publik (non-negara, non-pasar) tetap merupakan aktor yang memiliki peran penting dalam proses pencapaian arena masyarakat sipil. Secara ideal sebenarnya, kalangan akademis diharapkan mampu menjadi penyedia *intellectual capital* yang akan dibutuhkan sebagai pelengkap bagi *social capital* yang disuplai oleh elemen masyarakat sipil lainnya. Dengan legitimasi ilmiah dan akademis yang dimilikinya, serta dengan perspektif keilmuannya yang khas, universitas juga diharapkan mampu menjalankan peran sebagai *intellectual organic* yang akan membawa perubahan mendasar di masyarakat.

Secara praktis, mandat yang diemban universitas dalam kapasitasnya sebagai salah satu pilar *civil society* adalah untuk menjadi infrastruktur solidaritas sosial yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi aktivitas masyarakat sipil, yang dalam jangka panjang akan berdampak pada penguatan *civil society* secara umum. Melalui riset-risetnya yang berpihak pada kepentingan sipil, komunitas akademis diharapkan mampu memberikan pandangan ilmiah terhadap struktur dan bentuk solidaritas yang relevan yang seharusnya dikembangkan dalam konteks budaya sosial-politik setempat, serta pola relasi ideal yang seharusnya terbangun antaraktor dalam arena *civil society*.

Dengan kemampuan untuk memproduksi metode-metode baru gerakan sosial, membangun jaringan untuk pelayanan, menyediakan

alternative knowledge, dan mengadakan *database* universitas diharapkan mampu memainkan peran sebagai mediator antara masyarakat dan pembuat keputusan, dan antara masyarakat dengan aktor-aktor lain di level makro,

Tantangan terbesar bagi universitas saat ini adalah bagaimana mengembalikan norma-norma dan nilai-nilai ke-a'7<an yang selama ini telah ditinggalkan. Universitas harus menumbuhkan kembali keberpihakannya yang jelas dalam rangka membela kepentingan kelompok yang tidak memiliki kemampuan (akses) untuk menyuarakan aspirasinya. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, misalnya antara lain melalui penerapan *right-based approach* dalam kegiatan penelitian tentang kepentingan-kepentingan orang banyak, dan adanya produk-produk ilmiah yang tidak teralienasi, yang bisa bermanfaat dan memihak rakyat.

Dengan tanpa menafikan arogansi komunitas sosial yang mempersulit terbangunnya hubungan yang solid dengan elemen-elemen *civil society* lainnya, tampaknya kalangan pendidikan tinggi memang harus membenahi dirinya bila ingin mendapatkan kembali posisinya di masyarakat sipil. Kalangan ini sebaiknya mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi yang bebas dan terbuka, agar agenda bersama, yaitu meningkatnya posisi tawar *civil society* dapat diperjuangkan secara bersama pula.

* Tulisan ini merupakan risalah dari hasil diskusi panjang yang diselenggarakan dalam rangka pelebngaraan P iidvIS ^CIIICI IU1 Global Civil Societ y Studies. Lokakarva Per siapan, bertempat di FISIPUI, 16 C }ktober 2002. Lokakarva Pr< >Stratcgc Planning, di bertempat Mahakam, Hotel Gran 30 28- Oktober 2002. Pcrtemuan Strategic Planning, bertempat di rlotel Bumi Wiyata, yer 2002. Kxecutive Board, 11-1SNovemt lotel Kemang, 23-25 2. Pertemuan Policy Board, bertempat di I- Hotel Bumi Wiyata, er November 20C 2002. Pertemuan bertempat di 15-17 Dcscmb Dengan peserta:

Meth Kusumahadi	Yawasan Satu Nama
Rids Privanto	Center for Global Civil Society
Dina Arum Muninggar	Center for Global Civil Society
Anissa F.lok Budivam	Center for Global Civil Society
Silvia Juliana Malau	Center for Global Civil Society
Laila Hasnah	Center for Global Civil Society
Makmur Keliat Ph.D	Dept. Ilmu Hub. Internasional FISIPUI
SBK \Vardhani, S.IP	Dept. Ilmu Politik FISIP UI
Dra. Ida Rmvaida, M.Si	Dept. Sosiologi FISIPUI
Dr. Dedy Nur Hidayat	Dept. Ilmu Komunikasi

	FISIP UI
Riza Primahendra	Bina S\radava
Zaim Saidi	PIRAC
Agus Gunawan \Vibisono	LPTP
Lukas Ba\ai	YIS Solo
Ani Dwimartud	PPS\\"
Veronica	LBH Apik
Taufan	PBHI
Kurniadi	KCUK
Sunarjo	IDKA
Erpan Fariatli	KPA
Agustiana	SPP
Nan a Sukarna	Sawarung
Hendro Sangkoyo	Indu-idu
Lies Afarkus	Individu
Muntajid Billah	NDI Jakarta
FX Supiarso	VLB HI
Joko Sustanto	PACT
Ani Dwimartuti	PPS\\"
Jeff rvy Anwar	TIFA
Dr. Richardo	DNIKS
Greg Roonev	AusAID
Jerome Cheung	NDI Jakarta
Lukas Luarso	AJI
Naning Mardiniah	LP3HS
\Winoto	\VALHI
A. Erlangga Masdiana	Dept. Kriminologi FISIP UI
A. \\"aidi	Lakpesdam NU
Darw-ina Sri VCidjajanti	TIFA
Drs. Fredv B. L. Tobing, M.Si	Dept. Ilmu Hub. Internasional FISIP UI
Drs. Gumilar R. Soemantri, Ph.D	Dekanat FISIPUI

Hamdi Muluk	Fakultas Psikologi UI
Henry	Departemen Lingkungan Hidup
Kamanto Sunarto	Dept. Sosiologi FISIP 1.1
Lina Miftahul Jannah	Dept. Ilmu Administrasi FISIP UI
Maria Hartiningsih	KOMPAS
Riza Primacli	Trans TV
Satva Arinanto	Fakultas Hukum UI
Dr. Victor McNayang	Dept. Ilmu Komunikasi FISIP UI
DR. Ibnu Hamad	Dept. Ilmu Komunikasi FISIP UI
Yolkhart Finn Heinrich	CIVICUS

Walters, Oregon' J. *Technology and Paideia: Reformatting the Idea of the University.* Dalam www.gwalters.org/id2.html

REFERENSI

Damon, William. *The Path to a Civil Society goes Through the University.* Dalam www.compact.org/publication/Reader-VI-II.pdf.

Emberley, Peter C. *The Ra/e of Political Correctness in the Decline of Ubers! Education.* Dalam www.culturalrenewal.ca/disc/disc5.ht

Hi-

Patrick, John J.. *Education for Engagement in Civil Society and Government.* Dalam www.ericfaciliu.net/database/ERICDigcsts/ed423211.html.

Sullivan, William M. *The University as Citizen: Institutional Identity and Social Responsibility,* Dalam www.compact.org/publication/Reader-VI-II.pdf.